



## **GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 925 TAHUN 2025**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 245 TAHUN 2025 TENTANG DAFTAR KEGIATAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2025**

#### **GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 yang mendukung pelaksanaan sasaran Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025, maka telah ditetapkan Daftar Kegiatan Strategis Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 245 Tahun 2025 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa dengan surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : B/000.7/428/PUPP.1/2025 Hal : Penyampaian Penambahan Daftar Usulan Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2025 Tanggal 13 Agustus 2025, maka perlu melakukan Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 245 Tahun 2025 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);

9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 63);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 58);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6, Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 67);

16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 20);
17. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);
18. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 981);
19. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 1017) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 29 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 nomor 1049);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU :** Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 245 Tahun 2025 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA :** Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah perubahan nama kegiatan sehingga Daftar Kegiatan Strategis Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 menjadi sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau selaku pelaksana Kegiatan Strategis Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Gubernur Kepulauan Riau.

**KEEMPAT**

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 20 Agustus 2025

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**



**ANSAR AHMAD**

**Salinan**

: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau  
 Nomor : 925 Tahun 2025  
 Tanggal : 20 Agustus 2025

**DAFTAR KEGIATAN STRATEGIS DAERAH  
 PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2025**

**I. DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI  
 KEPULAUAN RIAU**

| NO  | NAMA PAKET PEKERJAAN/URAIAN SUB RINCIAN OBJEK   | LOKASI        |
|---|---|---------------|
| PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM  |   |               |
| KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) LINTAS KABUPATEN/KOTA  |   |               |
| SUB KEGIATAN PENINGKATAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) LINTAS KABUPATEN/KOTA   |   |               |
| 1   | Pengembangan Jaringan Perpipaan di Kawasan LANUDAL Tanjungpinang  | Tanjungpinang |
| PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG  |   |               |
| KEGIATAN PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI  |   |               |
| SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN, PELESTARIAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI                         |   |               |
| 2   | Pembangunan Rumah Sakit Angkatan Darat Desa Bengkong Kota Batam (Lanjutan)  | Batam         |
| 3   | Pembangunan Gedung Dirkrimsus Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, Kota Batam (Lanjutan)                             | Batam         |
| 4   | Pembangunan Gedung Persatuan Istri Tentara (Persit) di KOREM 033 WIRA PRATAMA, Tanjungpinang                      | Tanjungpinang |
| SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN, PERAWATAN, DAN PEMERIKSAAN BERKALA BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI                               |   |               |
| 5   | Rehabilitasi Kantor BLK Km. 8, Kota Tanjungpinang   | Tanjungpinang |
| 6   | Pemeliharaan/Renovasi Gedung Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau di Pulau Dompok, Kota Tanjungpinang | Tanjungpinang |
| PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA   |   |               |
| KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA                         |   |               |
| SUB KEGIATAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN CAGAR BUDAYA, KAWASAN PARIWISATA, KAWASAN SISTEM PERKOTAAN NASIONAL DAN KAWASAN STRATEGIS LAINNYA |   |               |
| 7   | Penataan Kawasan Taman Gurindam 12 (Lanjutan)   | Tanjungpinang |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN   |   |               |
| KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI   |   |               |

|   |   |               |
|---|---|---------------|
| SUB KEGIATAN REHABILITASI JEMBATAN      |   |               |
| 8                                       | Rehabilitasi Jembatan 2 Pulau Dompok, Kota Tanjungpinang  | Tanjungpinang |
| SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN BERKALA JALAN |   |               |
| 9                                       | Pemeliharaan Berkala Jalan Simpang Batu 14 - Pelabuhan Tanjung Berlian Kabupaten Karimun (DBH Sawit Provinsi Kepulauan Riau Lanjutan) | Karimun       |
| SUB KEGIATAN REKONSTRUKSI JALAN         |   |               |
| 10                                      | Peningkatan Jalan <i>Coastal Area</i> , Kabupaten Karimun   | Karimun       |
| 11                                      | Rekonstruksi Jl. Pelantar II, Kota Tanjungpinang  | Tanjungpinang |
| SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN JEMBATAN       |   |               |
| 12                                      | Pembangunan Jembatan Semala, Kabupaten Natuna   | Natuna        |
| SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN          |   |               |
| 13                                      | Pembangunan Jalan Akses Menuju Makogabwilhan Pulau Dompok (Lanjutan)  | Tanjungpinang |

## II. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

| NO   | NAMA PAKET PEKERJAAN/URAIAN SUB RINCIAN OBJEK  | LOKASI        |
|--|--|---------------|
| PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN   |  |               |
| KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITAS RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI   |  |               |
| SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN RUMAH KHUSUS BESERTA PSU BAGI KORBAN BENCANA PROVINSI   |  |               |
| 1  | Pembangunan Rumah Khusus Bagi Korban Bencana di Kecamatan Serasan                    | Natuna        |
| PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN   |  |               |
| KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS 10 (SEPULUH) Ha SAMPAI DENGAN DI BAWAH 15 (LIMA BELAS) Ha                 |  |               |
| SUB KEGIATAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DALAM KAWASAN PERMUKIMAN DENGAN LUAS 10 (SEPULUH) Ha SAMPAI DENGAN DI BAWAH 15 (LIMA BELAS) Ha |  |               |
| 2  | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Temoyong, Kecamatan Bulang, Kota Batam | Batam         |
| 3  | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kawasan Kumuh Kabupaten Bintan                      | Bintan        |
| 4  | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kawasan Kumuh Kabupaten Karimun                     | Karimun       |
| 5  | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kawasan Kumuh Kota Tanjungpinang                    | Tanjungpinang |
| 6  | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kawasan Kumuh Kabupaten Lingga                      | Lingga        |

| SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PEMUGARAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS 10 (SEPULUH) Ha SAMPAI DENGAN DI BAWAH 15 (LIMA BELAS) Ha |  |       |
|---|--|-------|
| 7   | Pembangunan Jalan Lingkungan di Kelurahan Temoyong, Batam  | Batam |
| 8   | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Skala Individual di Pemping                           | Batam |
| PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)   |  |       |
| KEGIATAN URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERMUKIMAN  |  |       |
| SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERMUKIMAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI PERMUKIMAN                      |  |       |
| 9   | Semenisasi Jalan Masuk menuju SMKN 9 Batam   | Batam |
| 10  | Pembangunan TPQ Yayasan Al-Hidayah Perumahan PGRI Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam | Batam |
| 11  | Penataan PSU Fasilitas Umum Kapling Tiban Madani, Tiban 1 RW 04 Kelurahan Patam Lestari, Sekupang        | Batam |
| 12  | Penataan PSU Fasilitas Umum Perumahan Tiban Palem RW 08 Kelurahan Tiban Baru, Sekupang                   | Batam |

### III. DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

| NO   | NAMA PAKET PEKERJAAN/URAIAN SUB RINCIAN OBJEK             | LOKASI                  |
|--|---|-------------------------|
| PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                               |   |                         |
| KEGIATAN PENGELOLAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS                   |   |                         |
| SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU                   |   |                         |
| 1  | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA di Rempang Galang | Batam                   |
| SUB KEGIATAN PENGADAAN PERLENGKAPAN PESERTA DIDIK            |   |                         |
| 2  | Seragam Siswa SMA   | Provinsi Kepulauan Riau |
| SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU                    |   |                         |
| 3  | Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMAN 25 Batam          | Batam                   |
| 4  | Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMAN 26 Batam          | Batam                   |
| 5  | Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMAN 29 Batam          | Batam                   |
| KEGIATAN PENGELOLAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN               |   |                         |
| SUB KEGIATAN PENGADAAN PERLENGKAPAN PESERTA DIDIK            |   |                         |
| 6  | Seragam Siswa SMK   | Provinsi Kepulauan Riau |
| SUB KEGIATAN PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA PESERTA DIDIK |   |                         |

|  |   |                         |
|--|---|-------------------------|
| 7  | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik           | Provinsi Kepulauan Riau |
| SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU  |   |                         |
| 8  | Pembangunan Ruang Kelas Baru di SMKN 10 BATAM             | Batam                   |
| 9  | Pembangunan Ruang Kelas Baru di SMKN 11 BATAM             | Batam                   |
| KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS     |   |                         |
| SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU |   |                         |
| 10   | Lanjutan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SLBN 2 Batam | Batam                   |

#### IV. DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

| NO   | NAMA PAKET PEKERJAAN/URAIAN SUB RINCIAN OBJEK  | LOKASI        |
|--|--|---------------|
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  |  |               |
| KEGIATAN PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI |  |               |
| SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA   |  |               |
| 1  | Pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) Tier III Tingkat Provinsi Kepulauan Riau | Tanjungpinang |
| SUB KEGIATAN PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS LAYANAN KESEHATAN   |  |               |
| 2  | Pengadaan Alat Kesehatan (Ventilator) untuk Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kepri                    | Batam         |

#### V. DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU

| NO  | NAMA PAKET PEKERJAAN/URAIAN SUB RINCIAN OBJEK    | LOKASI                            |
|---|--|-----------------------------------|
| PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN   |  |                                   |
| KEGIATAN PENGELOLAAN ANEKA ENERGI BARU TERBARUKAN BERUPA SINAR MATAHARI, ANGIN, ALIRAN DAN TERJUNAN AIR, GERAKAN DAN PERBEDAAN SUHU LAPISAN LAUT DALAM WILAYAH PROVINSI |  |                                   |
| SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMANFAATAN ANEKA EBT   |  |                                   |
| 1   | Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Tenaga Surya | Batam<br>Karimun<br>Tanjungpinang |
| PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN   |  |                                   |
| KEGIATAN PENGANGGARAN UNTUK KELOMPOK MASYARAKAT TIDAK MAMPU, PEMBANGUNAN SARANA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK BELUM BERKEMBANG, DAERAH TERPENCIL DAN PERDESAAN              |  |                                   |
| SUB KEGIATAN PENETAPAN PENERIMA MANFAAT DARI KELOMPOK MASYARAKAT TIDAK MAMPU  |  |                                   |
| 2   | Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL)               | Batam                             |

**VI. DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

| NO   | NAMA PAKET PEKERJAAN/URAIAN SUB RINCIAN OBJEK                | LOKASI |
|--|--|--------|
| PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN  |  |        |
| KEGIATAN PEMBANGUNAN, PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL |  |        |
| SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL  |  |        |
| 1  | Pengadaan dan Pemasangan Dermaga Apung HDPE Pelabuhan Jagoh  | Lingga |
| 2  | Pembangunan Pelabuhan Tanjung Permai Kampung Beko Pulau Kasu | Batam  |

**VII. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

| NO   | NAMA PAKET PEKERJAAN/URAIAN SUB RINCIAN OBJEK                                  | LOKASI                  |
|--|--|-------------------------|
| PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP  |  |                         |
| KEGIATAN PENGELOLAAN RUANG LAUT SAMPAI DENGAN 12 MIL DI LUAR MINYAK DAN GAS BUMI     |  |                         |
| SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PRASARANA USAHA PERIKANAN TANGKAP                            |  |                         |
| 1  | Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Nelayan Kecil                       | Provinsi Kepulauan Riau |
| SUB KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA USAHA PERIKANAN TANGKAP                               |  |                         |
| 2  | Penyediaan Bantuan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap kepada Nelayan Kecil | Provinsi Kepulauan Riau |
| KEGIATAN PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN SERTA PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN PROVINSI |  |                         |
| SUB KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PELABUHAN PERIKANAN                     |  |                         |
| 3  | Pembangunan Tambatan Perahu untuk nelayan di Kabupaten Karimun                 | Karimun                 |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA   |  |                         |
| KEGIATAN PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN DI LAUT                                      |  |                         |
| SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PRASARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DI LAUT                         |  |                         |
| 4  | Bantuan Jaring Keramba untuk Pembudidayaan Ikan di Laut                        | Bintan                  |
| SUB KEGIATAN PENJAMINAN KETERSEDIAAN SARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DI LAUT               |  |                         |
| 5  | Bantuan Bibit Ikan dan Pakan Ikan untuk Pembudidayaan Ikan di Laut             | Provinsi Kepulauan Riau |

**VIII. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

| NO   | NAMA PAKET PEKERJAAN/URAIAN SUB RINCIAN OBJEK   | LOKASI        |
|--|---|---------------|
| PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN   |   |               |
| KEGIATAN PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA |   |               |
| SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN KEWENANGAN PROVINSI                     |   |               |
| 1  | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Pekerjaan Renovasi Rumah Perlindungan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak) | Tanjungpinang |
| PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK   |   |               |
| KEGIATAN PENYEDIAAN LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH PROVINSI                                     |   |               |
| SUB KEGIATAN KOORDINASI PELAKSANAAN LAYANAN AMPK KEWENANGAN PROVINSI   |   |               |
| 2  | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Pekerjaan Renovasi Gedung Kantor UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak)      | Tanjungpinang |

**IX. RSUD RAJA AHMAD TABIB PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

| NO   | NAMA PAKET PEKERJAAN/URAIAN SUB RINCIAN OBJEK | LOKASI        |
|--|---|---------------|
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  |   |               |
| KEGIATAN PENYEDIAAN FASILITAS, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM dan UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI |   |               |
| SUB KEGIATAN PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS LAYANAN KESEHATAN   |   |               |
| 1  | <i>Bronchoscopy</i>                           | Tanjungpinang |
| 2  | <i>Treadmill</i>                              | Tanjungpinang |

**X. RSJKO ENGKU HAJI DAUD PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

| NO   | NAMA PAKET PEKERJAAN/URAIAN SUB RINCIAN OBJEK  | LOKASI |
|--|--|--------|
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  |  |        |
| KEGIATAN PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI |  |        |
| SUB KEGIATAN PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS LAYANAN KESEHATAN   |  |        |
| 1  | <i>Transcranial Magnetic Stimulation (TMS)</i> | Bintan |
| 2  | <i>Qualitatif EEG</i>                          | Bintan |
| 3  | <i>Bioneurofeedback</i>                        | Bintan |
| 4  | <i>Bed Electrical Hospital</i>                 | Bintan |
| 5  | <i>Bed Manual Hospital</i>                     | Bintan |

|   |  |        |
|---|--|--------|
| 6   | <i>Yovistra Psychiatric Bed</i>  | Bintan |
| 7   | <i>Wireless Digital Polysomnograph/PSG</i>   | Bintan |
| 8   | <i>Medicore Heart Rate Variability Analyzer</i>  | Bintan |
| SUB KEGIATAN PENGADAAN PRASARANA DI FASILITAS LAYANAN KESEHATAN |  |        |
| 9   | UPS 250 KVA  | Bintan |
| 10  | <i>Water Treatmen Plant (WTP)</i>  | Bintan |
| 11  | Sumur Artesis  | Bintan |
| 12  | Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)   | Bintan |
| 13  | <i>Incenerator</i>   | Bintan |
| SUB KEGIATAN PENGADAAN SARANA DI FASILITAS LAYANAN KESEHATAN    |  |        |
| 14  | Bangunan Gedung Kantor (Gedung Negara Tidak Sederhana) Gedung Inap Kesehatan Jiwa Geriatri Pria dan Wanita, Gedung Inap dan Rehabilitasi Komorbiditas, Gedung Inap Kesehatan Jiwa Akut Anak Pria dan Wanita, Gedung Rehabilitasi Psikososial Kesehatan | Bintan |
| 15  | Belanja Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Negara Tidak Sederhana  | Bintan |

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

  
ANSAR AHMAD